

ABSTRAK

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SABRINA EVRILIEN PUTRI HERNANDA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan pengaturan PATBM dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan PATBM di Provinsi Lampung sesuai dengan Teori Kebijakan Publik yaitu sebagai upaya yang dilakukan atau dipilih oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pengaturan tersebut sudah lengkap sebagai dasar hukum pelaksanaan PATBM melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan secara terperinci terdapat dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang PATBM, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah berkomitmen untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak dengan melibatkan peran serta masyarakat, khususnya pelaksanaan sosialisasi, pendampingan dan bantuan hukum, serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan rumah sakit. Pelaksanaan PATBM dalam mewujudkan hak-hak anak, khususnya korban kekerasan di Provinsi Lampung telah sesuai dengan pengaturan yang ada dan sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Partisipasi Publik, yaitu sebagai pedoman bagi pelaksanaan PATBM, sebagai dasar hukum melibatkan peran serta masyarakat dalam PATBM, menjadi dasar hukum untuk mendapatkan pembiayaan dalam pelaksanaan PATBM dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan PATBM. Meski demikian, persoalan-persoalan yang muncul dan menjadi kendala dalam pelaksanaan PATBM di Provinsi Lampung adalah keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi publik, dan pencegahan yang belum optimal karena belum semua kabupaten/kota melaksanakan pembentukan jejaring PATBM dan melaksanakan pelatihan kader.

Kata Kunci: Anak, Berbasis Masyarakat, Hak-Hak, Perlindungan, Terpadu.

ABSTRACT

COMMUNITY BASED INTEGRATED CHILD PROTECTION (PATBM) IN REALIZING CHILDREN'S RIGHTS IN LAMPUNG PROVINCE

**By
SABRINA EVRILIEN PUTRI HERNANDA**

The aim of this research is to analyze the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) regulatory policy in realizing children's rights in Lampung Province and the suitability between implementation and PATBM regulations in realizing children's rights in Lampung Province. The type of research used in this research is normative-empirical. The approach of research used statute approach, conceptual approach and interview with various related parties. The results of this research indicate that the PATBM regulatory policy in Lampung Province is in accordance with Public Policy Theory, namely as an effort made or chosen by the Lampung Provincial Government to provide protection for children's rights. These arrangements are complete as a legal basis for implementing PATBM through various statutory regulations. Detailed arrangements are contained in Lampung Governor Regulation Number 22 of 2022 concerning PATBM, which shows that the Lampung Provincial Government is committed to implementing child protection by involving community participation, especially the implementation of socialization, assistance and legal aid, as well as coordination with the police and hospital. The implementation of PATBM in realizing the rights of children, especially victims of violence in Lampung Province is in accordance with existing regulations and in accordance with the Legal Protection Theory and Public Participation Theory, namely as a guideline for the implementation of PATBM, as a legal basis for involving community participation in PATBM, being legal basis for obtaining financing for PATBM implementation and providing legal certainty for PATBM implementation. However, the problems that arise and become obstacles in implementing PATBM in Lampung Province are budget limitations, lack of public participation, and prevention that is not yet optimal because not all districts/cities have implemented the formation of PATBM networks and carried out cadre training.

Keywords: Children's, Community Based, Integrated, Protection, Rights.